

## **MEMBACA POLARISASI SANTRI DALAM KONTESTASI PILPRES 2019**

**Mohamad Khoirul Fata**  
**PUSHAM Surabaya**  
*Khoirulfata9@gmail.com*

### **Abstrak**

*Fenomena pilpres 2019 menjadi ajang dua kandidat calon presiden – Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma`ruf. Kelompok Islam pun banyak kelimpungan. Mereka yang mendukung pasangan Jokowi-Ma`ruf, diukung oleh partai Islam yakni PKB dan PPP. Dua partai tersebut punya hubungan yang intim dengan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, di kubu Prabowo-Sandi diukung oleh PKS, PAN dan PBB. Dalam partai-partai, hanya PAN yang memiliki kedekatan emosional dengan organisasi Muhammadiyah. Untuk itu, perlu mengetahui apa saja narasi-narasi Islam yang digaungkan tersebut sehingga membuat polarisasi dalam tubuh santri terjadi. Artikel ini berusaha menjabarkan narasi Islam yang membuat polarisasi berdasarkan kontestasi pilpres 2019. Sehingga untuk kepentingan artikel ini, penulis perlu menggunakan metode kualitatif, di mana penggalian datanya melalui pelbagai fenomena yang disuguhkan oleh beberapa media online maupun cetak. Metode kualitatif tersebut disokong analisis naratif-deskriptif yang menganalisis setiap fenomena ekspresi beragama di ruang publik berdasarkan representasi media.*

**Kata kunci:** *Polarisasi Santri, Narasi Islam, Kontestasi Pilpres 2019*

---

## A. PENDAHULUAN

Politik di Indonesia selalu mengalkulasi kelompok Islam mayoritas. Sejak didirikannya, politik di Indonesia terus bernegosiasi dengan kelompok Islam yang menempati struktur politik tertentu. Tak heran, bila dalam pilihan presiden 2019 antara Jokowi-Ma`ruf dan Prabowo-Sandi terus menggalang simpati dan dukungan kelompok Islam. Bisa dikatakan, peta pertarungan kandidat presiden tidak berubah secara signifikan. Namun dua kostestan pilpres tersebut meruncingkan polarisasi di dalam Islam, khususnya santri.

Deskripsi tentang santri sering dilakukan oleh banyak ilmuwan. Clifford Geertz merupakan salah satu pionernya. Ia mendeskripsikan santri dengan cermat dan lugas. Menurutnya, santri terbagi menjadi dua kelompok, yakni tradisional dan modern. Dua kelompok religius tersebut terus berkontestasi di akar-rumput untuk mempengaruhi masyarakat di Jawa.<sup>1</sup> Teori Geertz sudah mendapat kritik dan evaluasi sejak pertama kali di publikasi hingga saat ini. Itu menunjukkan betapa pentingnya karya Geertz sebagai acuan mendasar membaca dinamika identitas kultural di zamannya.

Dalam konteks tersebut, pandangan Najib Burhani memberikan catatan penting terkait nasib kesimpulan Geertz.<sup>2</sup> Najib menjelaskan dalam *“Geert’s Trichotomy of Abangan, Santri, and Priyayi Controversy and Continuity.”* Dalam uraiannya, ia memberi catatan bahwa semua evaluasi dan kritik terhadap konsep santri merupakan –apa yang disebut Najib –*one concept many name*. Najib bermaksud menyampaikan beragam identitas santri selalu ditunjukkan kepada kelompok muslim saleh. Namun karena pelbagai orientasi politik, ekspresi beragama, konsep santri menjadi bermacam-macam. Najib sendiri menabulasi setidaknya ada enam konsep dalam diri santri. Enam konsep tersebut adalah tradisional, modernis, neo-modernis, neo-revivalis, radikal

---

<sup>1</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Illinois: Massachusetts Institute of Technology, 1960), 179

<sup>2</sup> A. Najib Burhani, “Geertz’s Tricotomy of Abangan, Santri, and Priyayi” *Journal of Indonesian Islam*: Volume 11, Number 02, December 2017, 331

dan liberal. Tampak sekali Najib Burhani membuat kategori tersebut berdasarkan orientasi politik dan ekspresi beragama dalam diri santri.

Selain itu, Najib sekali lagi menunjukkan bahwa terminologi santri tidak bisa dikooptasi oleh kelompok tertentu di Indonesia. Ia melihat perdebatan tentang santri muncul kembali setelah Jokowi menetapkan hari santri pada 22 Oktober 2016. Menurut Najib, penetapan tersebut seperti menggiring opini publik bahwa santri merupakan identitas kultural keislaman yang melekat di tubuh NU. Argumentasinya berdasarkan bahwa penanggalan tersebut terkait peran santri-tradisional NU dalam sejarah Indonesia. Argumentasi tersebut ditepis Najib dengan menyuguhkan pelbagai kategorisasi yang dibuat oleh banyak akademisi/ilmuwan. Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan amatan pada bagaimana polarisasi santri yang terjadi dalam pilpres 2019 dan bagaimana narasi yang digunakan kelompok santri dalam dukungan politiknya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode analisis konten. Seperti yang dikatakan Marriotere,<sup>3</sup> tujuan analisis konten adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang polarisasi yang terjadi di tubuh santri. Hubungannya dengan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang pola politik santri dan dukungannya pada calon presiden 2019.

Analisis ini menggunakan metode akumulasi kasus keterlibatan santri dalam partai politik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana, data tersebut diperoleh dari pemberitaan di beberapa portal online seperti, kompas.com, tirto.id, dan beberapa media online yang berkaitan dengan isu tersebut. Adapun pembatasan tempo berita hanya diakumulasi mulai tahun 2018. Sedangkan data sebelum tahun 2018 digunakan untuk data pendukung.

---

<sup>3</sup> Marriote, *Analisis Isi: Membuka Gerbang Babasa*, (Jakarta: Wacana Satya, 2013), 37

## C. PEMBAHASAN

### 1. Terminologi Santri dari Zaman ke Zaman

Istilah santri memiliki riwayat yang panjang. Pertama-tama, khalayak umum biasa menggunakan istilah *putihan*. Istilah ini, digunakan seorang misionaris untuk merujuk pada kelompok Islam saleh. Ricklefs menjelaskan dengan gamblang, dalam artikelnya *Polarization in Javanese Society*, bahwa misionaris yang mendeskripsikan penggunaan tersebut ialah Carel Poensen.<sup>4</sup> Poensen, menurut Ricklefs, adalah seorang misionaris Belanda yang dikirim ke wilayah Kediri. Dalam lawatannya ke Kediri, Poensen menuliskan identitas keagamaan di Jawa terbagi menjadi dua, *putihan* dan *abangan*. Dua istilah tersebut untuk mendefinisikan kelompok yang taat beragama dan sebaliknya.

Ricklefs, dengan percaya diri menjelaskan proses-proses terbelahnya identitas keagamaan di Jawa. Dalam bukunya yang lain, *Mengislamkan Jawa*, Ricklefs melihat bahwa proses terbelahnya identitas tersebut disebabkan banyak hal. Sebelum identitas kejawaan tersebut terbelah, Ricklefs meyakini adanya sintesis-mistik di Jawa. Dalam sintesis-mistik, terjadi peleburan norma-norma Islam dengan ajaran-ajaran mistik kejawaan. Ricklefs menyimpulkan bahwa identitas tersebut perlahan-lahan memudar setelah terjadi perang Jawa yang dahsyat. Setelah kejadian tersebut, institusi pendidikan Islam –kita sebut pesantren– tumbuh subur.

Antusiasme beragama Islam pun terjadi di Jawa. Banyak orang Jawa berduyun-duyun untuk belajar Islam secara hakiki. Mulailah, model Islam *lamas* digalakkan yang secara konseptual disebut Ricklefs sebagai sintesis-mistik. Mencoloknya antusiasme tersebut ialah saat pelbagai organisasi berasaskan Islam berkembang di Jawa. Organisasi

---

<sup>4</sup> Carel Poensen is Dutch Missionaries, after briefly training to become a decorator, Carel Poensen entered the seminary of the Dutch Missionary Society (*Nederlandsch Zendelingsgenootschap*, NZG) in Rotterdam in 1855, and he left the Netherlands five years later to work as a missionary in the Dutch Indies. In 1916 he published a research artikel the title “*Christian-Muslim Relation 1500-1900*”.

seperti Muhammadiyah, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam mewarnai ekspresi beragama Islam di Jawa. Menurut Deliar Noer, kemunculan organisasi Islam tersebut adalah bentuk reaksi kelompok Islam atas gerakan politik atas nama agama. Hal tersebut mendorong santri untuk masuk dalam gerakan politik praksis dengan mengusung ideologi agama. Karena, ideologi agama khususnya Islam sangat beragam, maka para santri juga cenderung mengikuti tokoh yang diamininya. Sehingga, polarisasi santri yang terjadi dikalangan santri sangat kentara dalam narasi politik praksis ini.

Polarisasi santri sudah menggejala di akhir abad 19. Seperti terminologi Geertz dalam penelitiannya di Mojokuto, bahwa santri adalah kelompok yang mengamini doktrin keagamaan lebih kental dibandingkan dengan doktrin kebudayaan lokal. Untuk kalangan santri, rasa sebagai satu komunitas atau umat adalah yang utama. Dalam hal ini santri terbelah menjadi dua kelompok. Pertama, santri modern dan kedua, santri tradisional. Santri tradisionalis diasosiasikan dengan santri abangan. Di mana, kelompok santri ini lebih menggunakan kebudayaan lokal dalam memaknai ajaran agama. Pada kelompok santri tradisional, senyawa kebudayaan lokal dalam laku keseharian lebih kentara dibandingkan dengan santri modern. Santri modern yang digambarkan oleh Geertz lebih mengarah pada kelompok Muhammadiyah sedangkan kelompok tradisional lebih dekat dengan kelompok santri Nahdlatul Ulama' atau NU.

*"In describing religious pattern of santri variant, Geertz says that this group was, firstly, very concerned with religious doctrine and, secondly, having strong sense of community."*<sup>5</sup> Dalam pandangan Najib, varian santri ini lebih mengedepankan kesalehan atas doktrin agama dan mempunyai keterikatan yang kuat dalam komunitas keagamaannya. Kemudian, perdebatan tentang kategori santri ini berlangsung dikalangan akademisi salah satunya adalah Yon Machmudi. Ia mengkategorikan santri menjadi

---

<sup>5</sup> A. Najib Burhani, *Geertz's Tricotomy of Abangan, Santri, and Priyayi*, Journal of Indonesian Islam: Volume 11, Number 02, December 2017, 333

3 golongan dalam bukunya yang berjudul *Emergence of New Santri in Indonesia* (2008). Pertama, santri *convergent*, kedua santri *radical*, dan ketiga, santri *global*.

Santri *convergent* yang diamati olehnya merupakan kelompok moderat yang berada diantara kelompok santri tradisional dan modernis. Kelompok santri ini lebih dekat dengan narasi kelompok abangan. Mereka menggunakan narasi kebudayaan untuk berpijak dan menggunakan doktrin agama sebagai laku spiritualnya. Namun, tidak meninggalkan kebudayaan moyang selama ini diyakininya. Sedangkan kelompok santri radikal memilih untuk menerapkan ajaran Islam ala Arab yang dikehendaknya diterapkan di Indonesia. Kelompok ini diasosiasikan dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Ikhwanul Muslimin (IM).

Kelompok santri ketiga, santri *global*, berorientasi pada Islam trans-nasional. Ciri mendasar dari Islam trans-nasional yakni, gerakan yang bersifat transnasional, lintas negara, bahkan lintas bangsa. Sedangkan dalam ranah ideologi kelompok trans-nasional menggunakan ideologi gerakan, murujuk pada kesatuan atau perwujudan umat Islam secara utuh. Tidak lagi menggunakan Ideologi *nation-state* seperti ideologi di negara Indonesia. Kelompok yang lebih dekat dengan ciri yang ditampilkan di atas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, Jihadi, dan Jama'ah Tabligh.

Narasi pengkategorian santri tak berhenti pada Machmudi, Najib Burhani mengeluarkan kategori yang lebih bervariasi. Tentu tesis ini muncul setelah ia mengamati penetapan hari santri oleh presiden Jokowi 2016 silam. Kategori ini dalam amatan Najib terdapat 6 varian santri dalam tulisannya yang berjudul *Geertz's Trichotomy of Abangan, Santri and Priyayi* (2017). Keenam kategori tersebut disebutkan terdapat santri tradisional, modernis, neo-modernis, neo-revivalis, radikal dan liberal. Dalam terminologi Najib santri tradisional dan modern masih diasosiasikan pada kelompok NU dan Muhammadiyah sama halnya dengan pengkategorian Geertz. Menurut Najib, kedua kelompok ini sudah tidak lagi mengusung perubahan negara Indonesia menjadi

negara Islam meskipun kedua kelompok tersebut masih setuju dengan penerapan syariah secara substantif.

Kemudian kelompok neo-modernis berasal dari budaya tradisional dan modernis. Dalam amatan Najib mereka memperkenalkan sistem beragama baru yakni dengan memperkenalkan Islam melalui kursus singkat, seminar dan publikasi. Dalam tulisan Amir Aziz,<sup>6</sup> pandangan yang lebih populer bahwa Islam harus bersinergi dengan modernitas. Sehingga Islam tidak jatuh pada agama yang kaku dan kolot. Representasi dari kelompok ini adalah paramadina yang didirikan oleh Nurcholis Majid. Sedangkan santri neo-revivalis digawangi oleh Partai Keadilaan Sejahtera (PKS) dan Jemaah Tarbiyah. Semangat yang diusung oleh kelompok ini adalah mengembalikan kerangka sosial, ekonomi, dan agama pada dasar-dasar agama.<sup>7</sup>

Anggota kelompok neo-modern dan neo-revivalis tidak lepas dari dua kelompok besar yakni NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah secara bersamaan juga melahirkan kelompok radikal dan Liberal. Jaringan Islam Liberal dilekatkan pada kutub Islam liberal *"One reason for its establishment is to counter the growing influence and activism of militant and Islamic extremism in Indonesia. The "official" description of JIL is "a community which is studying and bringing forth a discourse on Islamic vision that is tolerant, open and supportive for the strengthening of Indonesian democratization."*<sup>8</sup>

Semangat Islam liberal sendiri lebih menajamkan *counter* pengaruh dan aktivisme kelompok ekstrim yang akan mengubah ideologi negara. Islam liberal menyuguhkan cara beragama yang ramah dengan ideologi negara. Sedangkan pada kutub yang berlawanan terdapat kelompok radikal. Misi yang dibawa adalah membawa sistem demokrasi pada sistem khilafah. Ajaran agama benar-benar ditegakkan sesuai

---

<sup>6</sup> Ahmad Amir Aziz, *Modernisme Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),15

<sup>7</sup> Abdul Karim Soroush *"Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdul Karim Soroush,"* Terj. Abdullah Ali, Abdul Karim Soroush: Menggugat Ototritas dan Tradisi Agama, Cet I, (Bandung: Mizan, 2002), 35-37.

<sup>8</sup> <http://islamlib.com/gagasan/islam-liberal/tentang-makna-liberal-dalam-islam-liberal/> diakses pada tanggal 11 November 2018

dengan agama mayoritas, yakni agama Islam. Dalam membaca narasi keagamaan kaum santri dapat saja memunculkan beragam ekspresi keagamaan bahkan ekspresi politiknya. Beragam varian tersebut mungkin saja kan terus bertambah seiring berkembangnya politik di Indonesia. Kita dapat mengamati pada berbagai media yang bermunculan bagaimana narasi santri sering digunakan dalam meraup massa.

Narasi yang digunakan untuk mengklasifikasi santri dalam ranah politik ini menggunakan kacamata Durkheim. Bahwa kesimpulan yang diberikan oleh Masham Moesa tentang kasus ini adalah agama yang sakral menjadi instrumen politik sesuai dengan konteks yang terjadi di Indonesia. Hubungan antara agama dan politik saat ini erat sebagai *traditional religio-political system*. Kondisi tersebut menandakan tidak ada ruang yang memisahkan antara komunitas politik dan keagamaan. Sama halnya misi agama yang bersifat spiritual dan sakral dibawa menuju politik praksis yang profan. Dalam kasus polarisasi yang terjadi dikalangan santri dapat dibaca sebagai politik keagamaan. Agama sebagai panjangan tangan dari politik. Bahkan persinggungan keduanya mengakibatkan politik yang radikal dikalangan kelompok santri tentu atas nama agama. Sehingga agama juga merupakan suatu alat yang diciptakan sebagai kontrol politik.

## **2. Kesadaran Politik Kaum Santri**

Pasca-Reformasi 1998, muncul suatu optimisme baru di kalangan umat Islam akan tampilnya kembali “Islam-politik” dalam percaturan politik di Indonesia setelah sekian lama semenjak demokrasi terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto dibungkam. Kran kebebasan yang dibuka begitu leluasa pasca reformasi telah membukakan jalan lebar bagi kembalinya umat Islam mengaktualisasikan potensi politiknya.

Setelah kran itu dibuka bagaimana wajah politik Islam saat ini? Apakah tradisi-tradisi politik Islam yang terepresentasikan pada tahun 1955 terulang kembali, semakin menguat atau semakin menurun? Namun demikian, secara kualitatif kemunculan partai-partai Islam

pasca-reformasi ini sebagian besar tidak lagi membawa agenda ideologis yang terang-terangan seperti pada Pemilu 1955. Hanya sebagian kecil partai Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB) yang masih ‘menjual’ kampanye Masyumi masa lalu untuk ditawarkan kepada pemilih Muslim masa kini.

Selain faktor isu dalam pemilihan, perubahan kualitatif partai-partai Islam baru ini terlihat pula dalam sikap atau perilaku politik mereka. Selain penyebutan asas Islam secara eksplisit di dalam konstitusi partai-partai Islam dan dukungan riil dari kelompok pemilih Muslim, sikap atau perilaku dan budaya politik partai-partai Islam hampir tidak dapat dibedakan dengan partai-partai lain yang tidak secara eksplisit menyebut diri mereka sebagai partai Islam. Dari sisi eksponennya pun tidak sedikit aktivis partai berhaluan nasionalis dan sekular seperti Golkar dan PDI yang berasal dari keluarga Muslim taat (baca: santri).

Kebudayaan merupakan keseluruhan ide, gagasan, tindakan dan hasil karya yang dimiliki oleh masyarakat yang diperoleh melalui belajar dan dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat.<sup>9</sup> Salah satu wujud kebudayaan adalah sikap atau perilaku atau tindakan (sistem sosial). Dengan banyak bermunculnya partai politik yang mengusung isu-isu agama, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan isu-isu lain seiring dengan perkembangan zaman guna merebut simpati atau dukungan masyarakat akan menimbulkan keresahan dan kebingungan khususnya bagi para santri NU (Nahdlatul Ulama).

Sejauh ini perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu berada dalam tarik-menarik dua pendapat yang saling bertolak belakang, yaitu: *pertama*, mengasumsikan bahwa komunitas pesantren bagai manapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lain. *Kedua*, mengkritik dengan keras bahwa keterlibatan pesantren dalam dunia politik lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat. Hal ini mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap “kotor”. Karena itu,

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, (Jakarta: UI Press, 2007), 156.

bagaimanapun baik dan kokoh landasan serta argumentasi teologisnya, pesantren yang terlibat politik akan terseret ke dalam dunia yang “kotor” pula.

Dien Syamsuddin mengungkapkan bahwa hubungan agama dan negara ada tiga teori, yaitu: Teori pertama menyatakan bahwa hubungan agama dan negara minimal ada tiga teori, yaitu: teori pertama adalah paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Teori kedua adalah paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Teori ketiga adalah paradigma simbiotik yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiosis mutualis, yaitu berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral.<sup>10</sup>

Kemudian, teori lainnya menjelaskan mengenai motif pentingnya keterlibatan kyai dan pesantren dalam politik. Menurut B.J. Bolland dalam bukunya “*The Struggle of Islam in Modern Indonesia*” minimal ada tiga motif, yaitu: yaitu ideologis, kharismatik, dan rasional. Motif ideologis, kyai pesantren memosisikan berpolitik sama dengan beragama Islam, sehingga semangat pembelaan politik sama dengan semangat membela dan memiliki Islam. Sedangkan motif kharismatis mengasumsikan bahwa kyai pesantren memilih berpolitik demi menunjukkan kekuatan kharismatisnya sehingga akan mudah memobilisasi massa. Dan, motif rasional, memosisikan kyai pesantren dalam berpolitik secara rasional.<sup>11</sup>

Pergulatan formalisasi syari’at Islam di Indonesia tak pernah padam. Masykuri Abdillah melihat bahwa munculnya era reformasi melahirkan iklim kebebasan dalam mengekspresikan pendapat tanpa

---

<sup>10</sup> Dien Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. IV, No. 2 1993.

<sup>11</sup> B.J. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 2002).

tuduhan tindakan subversi. Termasuk dalam hal ini adalah aspirasi umat Islam, baik dalam bentuk pendirian partai-partai politik maupun dalam bentuk pe-laksanaan syari'at Islam sebagai hukum positif maupun pemberlakuan piagam Jakarta. Hal ini membawa akibat pada pembicaraan hukum Islam dalam konteks hukum nasional tidak sebatas pada teori-teori integrasi (eklektisme), tetapi juga pada aplikasi materi-materi hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai hukum positif maupun diintegrasikan pada hukum nasional.<sup>12</sup>

Orientasi keagamaan kadang membuat kita lupa keanekaragaman budaya, ideologi, suku dan bahasa. Indonesia tidak mungkin dibuat sekuler karena kenyataannya bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang yakin akan keimanan terhadap ajaran agama dan yakin bahwa agama berperan dalam kehidupan bernegara dan dengan sendirinya negara juga berperan dalam kehidupan agama. Tetapi di pihak lain Indonesia juga tidak mungkin dibuat teokratis (Islam) karena negara teokratis pada masa Rasulullah di Madinah tidak mungkin diterapkan di Indonesia baik dari sudut pandang corak masyarakat, ideologi, suku, wilayah, kepemimpinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3. Polarisasi Santri dalam Pilpres 2019**

Santri menjadi komoditi yang gambut dalam kontestasi pilpres 2019. Dua kandidat calon, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga, saling berebut pengaruh terhadap kelompok-kelompok santri; baik kelompok santri yang direpresentasikan oleh partai-partai pengusung calon, maupun kelompok santri yang berasal dari kalangan masyarakat akar rumput. Polarisasi yang terjadi dalam tubuh santri akhirnya tidak lagi bisa terbaca hanya melalui kategori-kategori lama, seperti yang disuguhkan Poensen maupun Najib Burhani dengan kategori terbarunya. Sebab, polarisasi santri dalam kaitan pilpres 2019 tercipta melalui narasi-narasi yang dikomodifikasi oleh semangat kontestasi politik di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Masykuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 318.

a. *Populisme Islam yang Mewarnai Polarisasi Santri*

Salah satu unit analisis yang penting dalam membaca polarisasi santri dalam pilpres 2019 adalah dengan mengetahui populisme Islam. Istilah ‘populisme’ merujuk pada kelompok menengah yang hendak mengangkat dan mengatasnamakan aspirasi kaum pinggiran dengan menelikung demokrasi.<sup>13</sup> Berangkat atas kekecewaan perkembangan demokrasi pasca reformasi, Wasisto Rahrjo atas amatannya terhadap perkembangan sosio-politik di Indonesia, memandang adanya sebuah corak baru yang justru bertentangan dengan amanat konstitusi. Peristiwa besar yang menandai semangat ini adalah aksi massa di jalan atau “*mobo-crazy*”.

Aksi massal meledak dengan ditandainya serangkaian aksi 212, yang kemudian terus berkelanjutan hingga kegiatan-kegiatan kelompok yang mengatasnamakan alumni 212. Mulanya, aksi yang terjadi hingga tiga jilid ini bertujuan untuk menindak hukum Gubernur DKI Jakarta 2017 atas tuduhan penistaan agama dengan menghina Al-Qur’an dan Ulama. Gerakan ini diprakarsai oleh Rizieq Shihab, ketua Front Pembela Islam (FPI), dengan dukungan oleh kelompok Islam Radikal semisal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI, yang kini beralih menjadi GNPF Ulama).<sup>14</sup> Gerakan ini mendapatkan kemenangannya ketika Ahok berhasil dijebloskan ke penjara dan kekalahannya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2018.

Kemenangan di atas nyatanya bukan tujuan final dari kelompok-kelompok radikal tersebut. Senada dengan Vedi R. Hadiz, populisme dalam Islam menggunakan kata “umat” sebagai *proxy* demos yang secara eksklusif membela kepentingan umat muslim. Populisme Islam *alib-alib* mendukung demokrasi sebagai jalan membentuk pemerintahan malah cenderung mendukung bentuk pemerintahan yang bukan demokrasi. Misalnya bentuk negara dengan penetapan hukum

---

<sup>13</sup> Wasisto Rahrjo Jati, *Trajektori Populisme Islam di kalangan Kelas Menengah ke Atas Muslim di Indonesia*, Jurnal Prisma. Vol. 6, No 3. 2017, 21.

<sup>14</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/02/ohiuf384-sudah-dua-juta-massa-aksi-dari-daerah-berkumpul-di-jakarta>

syariah, bentuk negara teokrasi yang pada muaranya berbentuk Khilafah dan *daulah Islamiyyah*.<sup>15</sup> Semangat kelompok-kelompok radikal dan revivalis di atas tidak terbendung, hingga lahirlah rangkaian-rangkaian gerakan selanjutnya yang terus saja menyisakan polarisasi dalam masyarakat. Gerakan tersebut misalnya tercakup dalam gerakan alumni 212, kampanye tagar #2019gantipresiden, aksi bela ulama, aksi bela tauhid, hingga aksi terakhir yang sangat terkesan politis dalam alumni 212, 2 Desember 2018.

Tesis Noorhaidi Hasan dalam memandang jihadisme sebagai embrio dari populisme Islam menarik untuk menjelaskan narasi-narasi yang diciptakan kelompok menengah muslim Indonesia. Pada prinsipnya, kelompok tersebut hanya hendak mencari eksistensi ketimbang sekadar ideologi. Dengan kata lain, mereka hendak menampakkan taring eksistensi (politik) melalui jalan non-partai. Semangat jihadis tersebut, menurut Noorhaidi Hasan, membawa dampak bagi menjamurnya kekerasan yang mengatasnamakan Islam kembali menyeruak pasca orde baru. Konsekuensinya, label-label negatif seperti Kristen, Tionghoa, serta Barat yang menjadi musuh Islam.<sup>16</sup>

Wacana negatif yang seringkali digelontorkan kelompok muslim menengah tepat menysasar pada kubu yang hendak digulingkan. Praktik inilah yang terjadi dalam beberapa tahun di akhir kepemimpinan Jokowi. Sterotype buruk mulai dari sistem negara hingga pelemahan identitas Jokowi begitu ramai dikampanyekan sebagai label buruk yang harus digulingkan. Misalnya, sebutan dari sistem ekonomi pada periode Jokowi yang begitu liberal dan kapitalis, semakin memenjarakan kelompok miskin dan memberi kesempatan yang jauh lebar bagi ‘tangan-tangan’ asing. Jokowi sendiri disebut sebagai PKI dan Komunis yang condong kepada Tiongkok.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Vedi R Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 4

<sup>16</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Trayektori Populisme*,.... 22.

<sup>17</sup><https://geotimes.co.id/catatan-bawah-tanah/jokowi-amien-rais-dan-tuduhan-komunis-itu/>

Pada saat bersamaan, kelompok muslim menengah menyerukan standar-standar pemimpin yang layak untuk dipilih oleh umat muslim. Misalnya saja pernyataan Kapitra Ampera. Advokad GNPF ini dengan tegas menyatakan bahwa gerakan 212 bermaksud mengkonsolidasi umat muslim sehingga memiliki kesadaran untuk memilih pemimpin, baik melalui jalur pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.<sup>18</sup> Keterlibatan kelompok muslim menengah dalam konstelasi politik dapat dibaca sebagai upayanya mencitrakan diri sebagai masyarakat modern, namun sisi lainnya mereka tengah mengimajinasikan masyarakat yang sekaligus jauh lebih Islami.<sup>19</sup> *Conservative turn* ini didalilkan Martin van Bruinessen sebagai upaya pemurnian kembali masyarakat melalui Islam. Narasi lain yang mendukung adalah ‘pengkultusan’ ulama sebagai sikap taklid umat kepada pemimpin.<sup>20</sup>

*b. Narasi-narasi yang Membentuk Polarisasi Santri*

Fenomena populisme Islam yang digawangi oleh kelompok muslim menengah menjadi pijakan dua kubu yang tengah berkontestasi dalam ajang pilpres 2019. Upaya keduanya untuk meraup massa dukungan salah satunya dapat dilihat melalui partai ‘muslim’ pengusung dan penggandengan ulama-ulama yang berpengaruh dalam tubuh santri. Partai-partai pengusung Jokowi-Ma’ruf yakni oleh PKB dan PPP. Sementara dalam kubu Prabowo-Sandiaga diusung oleh partai PKS, PBB, dan PAN.

Pada bahasan sebelumnya, secara cerdas kubu Prabowo-Sandi mengambil celah emosi publik dan kelompok muslim menengah. Sebagaimana pengkategorian Najib, kelompok muslim menengah banyak diprakarsai oleh kelompok FPI dan GNPF; kelompok tersebut lebih cenderung lekat dengan kategorisasi santri neo-revivalis. Semangat

---

<sup>18</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928>

<sup>19</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia* (Depok: Penerbit LP3ES, 2017), 74

<sup>20</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Trayektori Populisme*, ..... 22.

yang diusung oleh kelompok ini adalah mengembalikan kerangka sosial, ekonomi, dan agama pada dasar-dasar agama.<sup>21</sup>

Kelompok tersebut, lengkap dengan gerakan-gerakan masanya, mempraktikkan populisme seperti hendak ‘memeluk’ demokrasi seraya mendesak rezim yang berkuasa agar mengakomodasi kepentingan politik mereka.<sup>22</sup> Fenomena ini terbukti dengan kedekatan kelompok neo-revivalis ini dengan kubu Prabowo-Sandi. Misalnya saja, penerimaan kubu Prabowo atas ijtima’ Ulama GNPF dalam memilih wakil presiden. Mulanya, hasil ijtima’ sangat jelas mengantarkan perwakilan-perwakilan kelompok revivalis menjadi wakil dari calon presiden. Hasilnya, ulama-ulama seperti Abdul Somad dan Salim Segaf Al-Jufri yang lebih dekat dengan kategori Islam konservatif, diajukan menjadi calon wakil presiden dalam pemilu 2019. Walaupun hasil akhir yang berlainan, kelompok revivalis ini tetap berada di kubu Prabowo-Sandiaga.

Kelompok yang selalu *vis a vis* dengan negara ini mendapatkan momentumnya dalam gerakan masal 212 pada 2 Desember 2018. Setelah sebelumnya kelompok ini terus didukung dalam bentuk kampanye ‘damai’ oleh Prabowo-Sandi, misal peresmian Gerakan Indonesia Sholat Subuh (GISS) dan reuni 212. Bentuk dukungan oleh ulama-ulama kemudian selalu dirujuk untuk calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ijtihad mereka, tak lain adalah Prabowo-Sandi. Pasangan capres-cawapres tersebut kiranya turut mengambil untung dari gerakan massa yang telah terbukti mampu memobilisasi kalangan santri. Tidak hanya kelompok revivalis yang diwakili oleh PKS, juga kelompok NU yang turut serta dalam pengawalan fatwa ulama.

Berlainan dengan narasi yang dibentuk oleh kubuandingannya, Jokowi-Ma’ruf. Upaya tanggap Jokowi dengan menggandeng salah satu tokoh penting NU juga akhirnya menciptakan

---

<sup>21</sup> Abdul Karim Soroush “*Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdul Karim Soroush*,” diterj. Abdullah Ali, Abdul Karim Soroush: *Mengganggu Ototritas dan Tradisi Agama*, Cet. I; (Bandung: Mizan, 2002), 35-37.

<sup>22</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Trayektori Populisme*,.... 24.

polarisasi santri yang begitu mencolok. Pilihan Jokowi ini bukan tanpa konsekuensi, pilihan politis ini kian menegaskan ketidaksiapan demokrasi di Indonesia. Fragmentasi populisme Islam dan reaksi terhadapnya melahirkan kontra-produktif bagi demokrasi.<sup>23</sup> Populisme Islam kanan oleh kelompok neo-revivalis lebih memiliki efek memecah. Misalnya saja dalam kasus pilkada Jakarta 2017, terdapat wacana “Islam radikal” versus “Islam plural/toleran”. Pewacanaan ini kemudian membentuk blok pro-Ahok dan anti-Ahok.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdil Mughis dkk, retorika eksklusioner yang secara khusus terkait dengan isu kepemimpinan politik dan agenda islamisasi mendorong penguatan artikulasi Islam pluralis dalam rangka mempersempit ruang gerak kelompok populisme Islam kanan. Melalui dukungan kelompok Islam pluralis dan ‘Populis-Nasionalis’, pemerintah pun mengambil sejumlah kebijakan untuk mengeksklusi bentuk Islam politik lainnya. Misalnya, pelarangan ormas ‘anti-pancasila’ serta penerbitan Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan UU. No 17 tahun 2013 terkait ormas. Dengan ini, keduanya, baik kelompok ‘populisme Islam kanan’ maupun ‘populis-Nasionalis’ sama-sama menggunakan Islam sebagai penanda politik. Artinya, artikulasi Islam pluralis/toleran yang sekan-akan menghindari artikulasi eksklusionaris, bermakna sama karena turut menggunakan logika eksklusionaris dan melanggengkan politik identitas.<sup>24</sup>

Pilihan Jokowi menjadikan Ma’ruf Amin dapat dilihat sebagai salah satu artikulasi untuk mempersempit ruang gerak kelompok santri neo-revivalis di kubu lawan. Selain sebagai tameng pembelaan diri, Ma’ruf adalah tokoh sentral yang turut dalam suksesi agenda-agenda politis kelompok menengah muslim. Puncaknya adalah fatwa MUI terkait tudingan penodaan agama oleh Ahok, sebagai muara dari polarisasi yang sudah terbentuk sejak kemenangan Jokowi dalam pemilu

---

<sup>23</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, Diatyaka Wisya Permata Yasih, Luqman-nul Hakim, *Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Prisma, Vol. 36, No. 3. 2017. 58.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 58.

2014. Selain itu, Mantan ketua MUI ini juga memiliki posisi penting dalam tubuh NU, yakni sebagai Rais ‘Aam Syuriah PBNU.

Jika menengok lagi pada varian santri oleh Najib Burhani, kategori santri tradisional dan modern jatuh pada kelompok NU dan Muhammadiyah. Kelompok ini ada pada pihak yang dapat dikatakan mengambil posisi ‘netral’ dan tidak memilih gerakan-gerakan aksi masa di jalan sebagaimana dilakukan oleh kelompok santri neo-revivalis.<sup>25</sup> Tak pelak, NU merepresentasikan kelompok muslim moderat menjadi rebutan antara dua kubu. Pasalnya, kelompok Nahdliyyin dengan klaim 60 juta anggota di Indonesia dipandang mampu membawa kemenangan dalam pilpres 2019.<sup>26</sup> Namun demikian, langkah praksis NU salah satunya dapat dibaca melalui partai PKB (representasi kaum Nahdliyyin) sebagai pengusung Jokowi-Ma’ruf.

Polarisasi santri dalam narasi berbeda juga terbentuk melalui politik pewacanaan yang sejak awal dilakukan Jokowi. Wacana yang kerap kali muncul adalah sebuah corak Islam moderat, disebut sebagai ‘Islam Nusantara’. Corak ini dikenalkan sebagai definisi Islam yang mampu bersesuaian dengan budaya Nusantara, prinsip pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika. Wacana Islam nusantara dalam masa kepemimpinan Jokowi kemudian mendapat dukungannya melalui peresmian oleh PBNU, yang pada saat itu diketuai oleh Said Aqil Siraj.<sup>27</sup> Pada saat yang sama, pewacanaan ini juga dilakukan sebagai penanda politik. Misalnya saja penetapan baru sebagai ‘titik nol Islam nusantara’ oleh presiden Jokowi. Diskursus yang penuh perdebatan dan cenderung ‘memaksa’ ini dipandang oleh Azyumardi Azra telah melepaskan kebijakan bersejarah dengan tradisi akademik-ilmiah.<sup>28</sup> Praktik pewacanaan tersebut seolah menjelaskan bahwa rezim tengah

---

<sup>25</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46387707>

<sup>26</sup> <https://tirto.id/siapa-yang-lebih-membutuhkan-nu-jokowi-atau-prabowo-cPFE>

<sup>27</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170716130510-32-228190/menilik-siasat-kemesraan-presiden-jokowi-dengan-nu>

<sup>28</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2017/08/10/membaca-hasrat-politik-islam-nusantara>

bergerak dengan menegaskan diri sebagai rezim Islam yang moderat. Tujuan praksisnya jelas, keuntungan massa pendukung yang hendak ditabung demi kemenangan dalam kontestasi pemilu 2019.

## **KESIMPULAN**

Polarisasi santri dalam kontestasi pilpres 2019 hanya mampu diketahui dengan melihat narasi-narasi yang dikomodifikasikan oleh dua kontestan pilpres, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Kemenangan Jokowi dan kekalahan Prabowo pada pilpres 2014 telah menyisakan segregasi dalam ruang sosial. Di saat yang sama, tuntutan-tuntutan penyelesaian masalah demokrasi dan kekecewaan kelompok begitu mendesak dirampungkan. Kelompok yang paling getol menyuarakannya adalah kelas menengah muslim. Hingga puncaknya dalam serangkaian aksi massa di jalan (*mobocracy*). Aksi ini kemudian lebih dikenal dengan aksi 212, aksi bela ulama, #2019gantipresiden, dan sebagainya. Corak populisme Islam ini adalah kelompok menengah yang mengatasnamakan aspirasi kaum pinggiran dengan 'menelikung' demokrasi.

Penelikungan ini terjadi karena semangat yang dibawa adalah persatuan umat Islam dan pengubahan sistem demokrasi menuju khilafah. Kelompok neo-revivalis ini kemudian mendapatkan wadah eksis pada kubu Prabowo. Tetap melalui politik pewacanaan agama dengan berbagai aksi massa. Sedangkan di kubu Jokowi narasi yang digunakan untuk mengusung dukungannya adalah melalui politik wacana tentang Islam nusantara, dan pewacanaan Islam ramah terhadap ideologi negara. Kubu Jokowi cenderung diusung oleh kelompok Islam tradisional, Islam modern, Islam neo-modern dan kelompok Islam liberal. Naras-narasi yang digunakan dalam meraup dukungan ini masih menggunakan instrumen agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri dkk. *Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas* Jakarta: Renaisan, 2005.
- Amir, Ahmad Aziz, *Modernisme Islam di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Azizah, Nurul. *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati*, Jember: STAIN Jember Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2013.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*, Illinois: Massachusetts Institute of Technology, 1960.
- J B. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 2002.
- Karim, Abdul Soroush. "Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdul Karim Soroush," diterj. Abdullab Ali, Abdul Karim Soroush: *Menggugat Otoritras dan Tradisi Agama*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2002.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Marriote, *Analisis isi: Membuka gerbang bahasa*, Jakarta: Wacana Satya, 2013.
- R. Vedi Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Raharjo, Wasisto Jati, *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia*, Depok: Penerbit LP3ES, 2017, 2017.
- Abdul, M. Wahid. *Fundamentalisme dan Radikalisme (Telaah Kritis dan Eksistensinya Masa Kini)*, Makasar: Sulusena, Vol. 12. No.1, 2018.
- Mughis, Abdil Mudhoffir, Diatyaka Wisya Permata Yasih, Luqman-nul Hakim, *Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Prisma, Vol.36, No. 3. 2017.
- Najib, Ahmad Burhani. *Geertz's Tricotomy of Abangan, Santri, and Priyayi*, Journal of Indonesian Islam: Volume 11, Number 02, 2017.

Raharjo, Wasisto Jati. *Trajektori Populisme Islam di kalangan Kelas Menengah ke Atas Muslim di Indonesia*, Jurnal Prisma. Vol. 6, No 3, 2017.

Syamsuddin, Dien, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. IV, No. 2, 1993.

<http://Islamlib.com/gagasan/Islam-liberal/tentang-makna-liberal-dalam-Islam-liberal/>

<https://geotimes.co.id/catatan-bawah-tanah/jokowi-amien-rais-dan-tuduhan-komunis-itu/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46387707>

<https://tirto.id/siapa-yang-lebih-membutuhkan-nu-jokowi-atau-prabowo-cPFE>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170716130510-32-228190/menilik-siasat-kemesraan-presiden-jokowi-dengan-nu>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/02/ohiu-f384-sudah-dua-juta-massa-aksi-dari-daerah-berkumpul-di-jakarta>

<http://aceh.tribunnews.com/2017/08/10/membaca-hasrat-politik-Islam-nusantara>